

**TESIS**

**UPAYA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**



oleh:

**WINDA DIASTARINA**

**NIM. 2320215320145**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**BANJARMASIN**

**2025**

**UPAYA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

**TESIS**

**Untuk memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh:**

**WINDA DIASTARINA  
NIM 2320215320145**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**BANJARMASIN**

**2025**

**Judul Tesis : UPAYA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

**Nama : WINDA DIASTARINA**

**NIM : 2320215320145**

**Disetujui,  
Komisi Pembimbing**

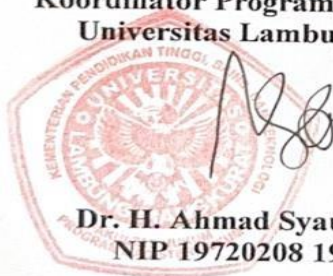
**Pembimbing,**



**Dr. Hj. Erlina, S.H, M.H  
NIP 19780502 20112 2 002**

**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP 19750615 200312 1 001**

**Tanggal Lulus:**

**Tanggal Wisuda:**

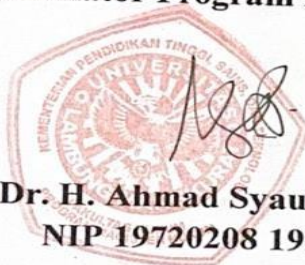
Tesis ini  
Telah Diperiksa Dan Disetujui  
Pada Tanggal 22 Juli 2025

Pembimbing,



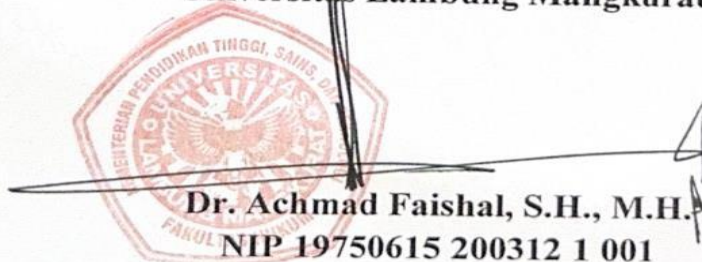
Dr. Hj. Erlina, S.H, M.H  
NIP 19780502 20112 2 002

Disahkan Oleh  
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP 19720208 199903 1 004

Diketahui oleh,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP 19750615 200312 1 001

**Tesis Ini Telah Dipertahankan**

**Di Depan**

**Sidang Panitia Penguji Tesis**

**Pada Tanggal 22 Juli 2025**

**Susunan Panitia Penguji Tesis**

**Ketua : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum**

**Sekretaris : Prof. Mirza Satria Buana, S.H, M.H, Ph.D**

**Anggota : Dr. Hj. Erlina S.H., M.H.**

## **MOTTO/ PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

*”Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat”*

*“Kebaikan adalah investasi terbaik dalam kehidupan, teruslah berbuat baik”*

*“Allah tidak pernah menjanjikan kehidupan pasti akan selalu mudah, namun Allah menjanjikan di setiap kesulitan pasti ada kemudahan”*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Winda Diastarina  
NIM : 2320215320145  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

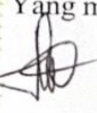
1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar meruakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain , kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka dan bebas dari plagiarism.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 22 Juli 2025



Yang membuat pernyataan

  
Winda Diastarina  
NIM. 2320215320145

**DIASTARINA, WINDA. 2025. UPAYA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH., Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H, M.H**

### **RINGKASAN**

Penelitian ini mengkaji mekanisme pembentukan peraturan daerah dalam kaitannya dengan integrasi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dan partisipasi publik. Penekanan utama ditujukan pada sejauh mana instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan HAM, telah diterapkan secara substantif dalam pembentukan produk hukum di daerah. Penelitian ini juga menyoroti rendahnya kualitas regulasi daerah yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta masih maraknya peraturan diskriminatif, yang menunjukkan lemahnya sistem pembinaan dan pengawasan, serta keterlibatan publik yang cenderung simbolik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, laporan kelembagaan), dan bahan hukum tersier (kamus hukum).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh tahapan pembentukan peraturan daerah, mulai dari perencanaan hingga pengundangan, masih minim mengadopsi prinsip partisipasi dan HAM secara substantif. Permasalahan utama terletak pada belum adanya norma positif yang secara eksplisit mewajibkan pengintegrasian

HAM serta pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasannya. Selain itu, proses harmonisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM belum menjadi tahapan wajib dan tidak memiliki kekuatan mengikat dalam tahapan pembentukan perda.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem digital partisipatif, pengaturan pembagian kewenangan pembinaan dan pengawasan antara Kemenkum, Kemenham dan Kemendagri, serta revisi pedoman pembentukan produk hukum daerah agar tahapan harmonisasi dan integrasi nilai HAM bersifat wajib dan mengikat secara hukum.

**DIASTARINA, WINDA. 2025. UPAYA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH., Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H, M.H**

## **ABSTRAK**

**Kata kunci:** *Harmonization, Local Regulation, Human Rights, Public Participation, RANHAM.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas mekanisme pengintegrasian nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembentukan peraturan daerah di Indonesia, khususnya melalui peran harmonisasi Kementerian Hukum dan Kementerian Hak Asasi Manusia serta implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Ruang lingkup penelitian mencakup analisis terhadap pembinaan dan pengawasan regulatif oleh pemerintah pusat serta partisipasi masyarakat dalam proses legislasi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai dasar hukum yang menjamin partisipasi publik dan pengarusutamaan HAM, dalam praktiknya masih ditemukan keaburan norma dan lemahnya koordinasi antar-instansi. Harmonisasi yang dilakukan oleh Kemenkumham belum menjadi tahapan yang mengikat dalam proses legislasi daerah, sementara implementasi RANHAM di daerah mengalami kendala akibat keterbatasan anggaran, kapasitas kelembagaan, serta minimnya pengawasan yang substansial. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan perlunya penguatan regulasi dan sinergi kelembagaan untuk menjamin integrasi nilai HAM dalam seluruh proses pembentukan peraturan daerah agar responsif, partisipatif, dan adil.

**DIASTARINA, WINDA. 2025. UPAYA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH., Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H, M.H**

***ABTRACT***

***Keywords; Harmonisasi, Peraturan Daerah, Hak Asasi Manusia, Partisipasi Publik, RANHAM.***

*This study aims to examine the effectiveness of integrating human rights values in the for-mulation of local regulations in Indonesia, particularly through the harmonization role of the Ministry of Law and Human Rights and the implementation of the National Action Plan on Human Rights (RANHAM). The scope includes regulatory supervision by the cen-tral government and public participation in local legislative processes. The research em-plies a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, analyzed qualitatively. The findings reveal that despite legal guarantees for public participation and mainstreaming of human rights, there remain normative ambiguities and weak institu-tional coordination. The harmonization process conducted by the Ministry of Law and Human Rights is not binding in local legislative procedures, while the implementation of RANHAM at the local level faces significant challenges due to limited funding, institu-tional capacity, and lack of substantive monitoring. The study concludes that there is an urgent need to strengthen legal frameworks and institutional synergy to ensure that hu-man rights values are integrated throughout the legislative process, resulting in respon-sive, participatory, and equitable local regulations.*

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat Allah Saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Melalui Pembentukan Peraturan Daerah”. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai masa penyusunan tesis ini, tentunya sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Achmad Faishal, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Saya ucapkan terimakasih atas motivasi yang diberikan selama masa perkuliahan.
2. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H, M.H, selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang sangat memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi dalam masa perkuliahan serta penyusunan tesis ini.
3. Dr. Hj. Erlina, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing yang sangat saya hormati dan banggakan. Saya ucapkan terimakasih yang tidak terhingga karena tanpa lelah memberikan motivasi, masukan, serta bimbingan yang sangat baik terhadap tesis ini.
4. Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H, M.Hum, selaku Ketua tim penguji yang selama proses pembelajaran dan penyusunan tesis ini sangat banyak memberikan masukan dan bimbingan.

5. Prof. Mirza Satria Buana, S.H, M.H., Ph.d, selaku Sekretaris dalam susunan penguji tesis ini. Saya ucapkan terima kasih atas masukan yang konstruktif terhadap penyusunan tesis ini.
6. Para Dosen Pengajar, serta akademik di Magister Hukum Universitas Lambung mangkurat yang selama perkuliahan ini memberikan ilmu yang sangat bermanfaat serta sudah sangat membantu dalam proses penyusunan tesis ini.
7. Orang Tua tercinta, Dr. H. Suhardjo, M. Si dan Hj. Yunti Narjiatmi, S.Pd, yang senantiasa memberikan do'a serta dukungan yang tidak terputus terhadap saya selama ini.
8. Suami tercinta, terima kasih atas dukungan dan motivasi untuk selalu menjadi versi terbaik dalam hidup ini, selalu menjadi teman terbaik untuk berdiskusi.
9. Kedua buah hati, Abrisam Firaz Musyaffa dan Adzkiya Farras Maiza. Terima kasih atas waktu yang kalian iklaskan di akhir pekan untuk mamah dan papah menuntut ilmu. Semoga mamah dan papah bisa memberikan teladan dan motivasi bagi kalian dalam menuntut ilmu kelak.
10. Teman-teman "seksi pendapatan lainnya", terima kasih banyak atas suasana yang nyaman dan menyenangkan setiap harinya, sehingga Saya bisa mencuri waktu untuk menyusun tesis ini di antara waktu bekerja.
11. Teman-teman kelas HTN serta teman-teman kelas B angkatan 2023, terimakasih atas kebersamaan dan motivasi yang sangat besar selama ini.

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
MOTTO/PERSEMBAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	19
E. Tinjauan Pustaka.....	19
F. Metode Penelitian .....	39
G. Sistematika Penulisan .....	46
BAB II MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA.....	48
A. Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan Peraturan Daerah Sebagai Salah Satu Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia .....	52
B. Pengintegrasian Nilai HAM dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah .....	59
C. Partisipasi Masyarakat dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah .....	77
BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH MELALUI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH .....	85
A. Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri .....	87
B. Peran Kementerian Hukum dalam Upaya Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Daerah.....	97

C. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai Instrumen Pembinaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM di Daerah .....	109
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	121
A. Kesimpulan .....	121
B. Saran .....	122
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Bentuk kewajiban negara dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia .....	7
Tabel 2.1 Perbedaan rumusan norma Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebelum dan sesudah perubahan. ....	77
Tabel 2.2 Perbedaan rumusan norma Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebelum dan sesudah perubahan. ....	78
Tabel 3.1 Perbedaan rumusan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebelum dan sesudah perubahan .....	98
Tabel 3.2 Perbedaan mendasar antara regulasi mediasi dan judicial review .	105

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta perda/kebijakan bersifat diskriminatif.....	4